

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian tinjauan pustaka terdiri dari dua hal yakni penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi uraian secara sistematis tentang penelitian terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kerangka teori memuat tentang teoritisasi variabel dalam penelitian sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

2.1 Penelitian Terdahulu

Latifa (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia* menjelaskan bahwa Indonesia masih tergolong ke dalam negara dengan prevalensi stunting yang tinggi, yaitu sekitar 36%. Di sisi lain pemerintah Indonesia telah memiliki sejumlah kebijakan dan regulasi terkait penanggulangan masalah stunting, di mana upaya yang dilakukan meliputi intervensi spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan, dan intervensi sensitif yang dilakukan oleh lintas sektor di luar kesehatan. Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait upaya penanggulangan gizi buruk kemudian tidak dilanjutkan dan diinterpretasikan ke dalam rangkaian program dan kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap kementerian/lembaga terkait disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai wujud dari intervensi pemerintah. Faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap stunting, di antaranya masalah kemiskinan, tingkat pendidikan, dan pendapatan keluarga yang rendah.

Purwanti (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Kebijakan dan Strategi Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kalurahan Donokerto Turi Sleman Yogyakarta* menyebutkan bahwa masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintahan desa dalam mengimplementasikan kebijakan stunting. Rancangan yang ditawarkan oleh pemerintahan desa dalam upaya pencegahan stunting dimulai dengan program tertib posyandu, pelatihan kader-kader yang akan membantu bidan desa dalam mengatasi stunting yang ada di Desa, dan juga pemberian asupan gizi tambahan bagi ibu yang masih dalam tahap hamil dan menyusui serta bayinya.

Analisis kebijakan yang menjadi patokan dasar dalam mengkaji tentang kebijakan pencegahan stunting di Desa Donokerto, maka ditemukan beberapa hal antara lain, dari segi kebijakan, anggaran, kesehatan dan sumber daya manusia. Dari segi kendala dana dan sumber daya manusia menjadi unsur terpenting yang sampai pada saat ini masih menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan penanganan stunting ini.

Syafrina et al. (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam Mengatasi Masalah Stunting Berdasarkan Nutrition Commitment Index 2018* menyebutkan bahwa kebijakan/program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman difokuskan dengan melihat satu sub index saja yaitu *Nutrition Commitment Index* (NCI), alasan karena NCI melihat komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah kekurangan gizi. NCI terdiri dari 12 indikator diantaranya yaitu anggaran gizi, cakupan vitamin A, promosi MP-ASI, akses air bersih, akses sanitasi, kunjungan ibu hamil, fitur gizi dalam kebijakan pembangunan nasional, rencana gizi nasional, kerja sama multisektor, target program gizi, survei gizi nasional, dan aspek hukum. Hasil penilaian secara kualitatif terhadap 12 indikator NCI diketahui 6 indikator sudah dijalankan, berarti komitmen Pemerintah Daerah Padang Pariaman terhadap masalah stunting sudah cukup baik, tetapi masih perlu peningkatan untuk indikator-indikator yang tidak tercapai. Dimana dalam mengetahui hasil tersebut didukung dengan hasil penskoran yang dilakukan.

Priyono (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang)* menyebutkan bahwa strategi penurunan angka stunting lebih difokuskan kepada strategi peningkatan pola asuh dalam kaitan dengan sistem pendataan, pemantauan status gizi, serta penanganan gizi buruk anak balita perdesaan, yang telah ditemukenali dalam melalui analisis sebelumnya. Penentuan strategi menggunakan metode analisis SWOT, guna menemukan alternatif strategi yang paling optimal dan efisien dalam penurunan angka stunting. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi efektif percepatan penurunan angka stunting perdesaan berupa kombinasi strategi agresif,

mengoptimalkan intervensi gizi spesifik dan sensitif untuk mendorong peningkatan kualitas pola asuh anak balita. Strategi jangka panjang memanfaatkan peluang dukungan komitmen pemerintah dan sinergi konvergensi pencegahan stunting guna percepatan penurunan angka stunting perdesaan.

Mastina (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Penanganan Stunting Balita* menjelaskan bahwa perencanaan dan penganggaran program pencegahan stunting di Kabupaten Kampar sudah tersedia dan konsisten dengan arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kampar 2017-2022 dan telah diintegrasikan ke dalam renstra perangkat daerah sebagai landasan operasional. Kabupaten Kampar sudah memiliki program inovasi spesifik lokal daerah untuk penanganan stunting balita yaitu “Gadiah Aneak, Ocu Mapan, GEMARIKAN, dan Posyandu Mobile”. Upaya yang telah dilakukan melalui pelaksanaan program inovasi spesifik lokal dan terobosan dalam penanganan stunting di Kabupaten Kampar menunjukkan sudah terlaksananya koordinasi dimasyarakat, yaitu pada kelompok ibu kader desa, bidan, dan anak remaja khususnya wanita pada usia produktif yaitu dengan aksi pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri khususnya yang putus sekolah. Program-program spesifik lokal untuk pencegahan stunting ini sudah ada namun belum optimal. Keterlibatan tokoh adat belum sepenuhnya dioptimalkan dalam intervensi pencegahan stunting, sehingga hal ini perlu diperhatikan agar program memberi dampak yang kuat dalam penurunan stunting di Kabupaten Kampar.

Nasir et al. (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Kelas Ibu Hamil dalam Rangka Pencegahan Stunting* menjelaskan bahwa kegiatan kelas ibu hamil ini sebagai upaya untuk penurunan kasus stunting. Kelas ibu hamil merupakan sarana belajar bersama tentang kesehatan bagi ibu hamil dalam bentuk tatap muka dalam kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu mengenai kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, nifas, serta bayi baru lahir. Dengan adanya kelas ibu hamil, ibu dapat mengetahui tentang pengaturan gizi saat hamil yang secara langsung meningkatkan pengetahuan ibu tentang pencegahan stunting. Ibu yang mengikuti kelas ibu hamil sebagian besar memiliki pengetahuan

yang baik dan sikap yang positif.

Wardani et al. (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Sebuah Alternatif: Indeks Stunting Sebagai Evaluasi Kebijakan Intervensi Balita Stunting Di Indonesia* menjelaskan bahwa Indeks stunting sebagai alat ukur baru dapat divalidasi menggunakan validitas konkuren dengan cara menghitung korelasi indeks tersebut dengan ukuran yang menjadi kriteria, yakni ukuran eksternal yang telah dianggap valid. Hasil ini sekaligus memungkinkan Indeks Stunting merupakan ukuran yang valid digunakan di Indonesia meskipun penafsiran secara hati-hati tetap diperlukan karena tidak ada indeks komposit yang berlaku secara universal. Model Indeks Stunting merupakan ukuran evaluasi yang responsif terhadap intervensi stunting pada balita (0-56 bulan) di Indonesia. Indeks stunting komposit secara nasional pada rentang tahun 2015-2018 mengalami peningkatan dan perbaikan meskipun berada pada kategori sedang.

Salmon et al. (2022) dalam penelitiannya yang berjudul *Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sangihe)* menjelaskan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan strategi perencanaan mereka bekerja sama dengan beberapa instansi terkait di Daerah untuk mengatasi permasalahan stunting yaitu dari pihak Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Daerah Kabupaten kepulauan sangihe lewat program dari BKKBN, yaitu Program Pembangunan Keluarga Sejahtera meliputi; Pembinaan Keluarga, Pembangunan Ketahanan Keluarga, dan Pencegahan Stunting. Dalam Program-program yang ada, sudah baik tapi pada koordinasinya sebagian tiap TPK belum terlalu paham betul dengan kegiatan atau Program yang akan di jalankan karena sebagian khususnya Program menggunakan Aplikasi dan dari TPK ada sedikit pengeluhan jaringan dalam menjalankan salah satu kegiatan atau program- program yang ada dari Pihak BKKBN sendiri, serta permasalahan jaringan yang menyulitkan TPK dalam menjalankan programnya.

Lelono (2022) dalam penelitiannya yang berjudul *Evaluasi Program Pendidikan Karakter di SMP Islam Matholi'ul Falah Blora Provinsi Jawa Tengah*

Tahun 2021 menjelaskan bahwa menggunakan model evaluasi yakni *Context, Input, Process, Product* (CIPP) sebagai acuan. Pada aspek Konteks (*Context*) sebagian besar sudah terpenuhi dengan baik, dari profil program berupa (visi, misi, tujuan dan latar belakang) yang jelas dan rinci. Pada aspek Masukan (*Input*) sebagian besar komponen masukan sudah terpenuhi dengan baik, mayoritas guru sudah melaksanakan program pendidikan karakter dengan baik namun masih ada guru yang kurang optimal dalam menerapkan nilai karakter. Pada aspek Proses (*Process*) seluruh komponen sudah cukup terlaksana dengan baik. Pada aspek Produk (*Product*) sebagian besar komponen produk pada program pendidikan karakter di SMP Islam Matholi'ul Falah Blora Provinsi Jawa Tengah, telah mendapat hasil yang baik dari segi penanaman nilai-nilai karakter yang dilaksanakan, dan internalisasi atau pembiasaan pendidikan karakter setiap peserta didik melakukan kegiatan di sekolah.

Turmuzi et al. (2022) dalam penelitiannya yang berjudul *Literature Review: Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum 2013 Menggunakan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product)* menjelaskan bahwa keterlaksanaan kurikulum 2013 menggunakan model evaluasi CIPP menghasilkan bahwa pendidikan multimedia interaktif berbasis kurikulum 2013 sudah teruji menolong guru selaku perlengkapan buat mengartikulasikan penyajian topik yang memotivasi siswa serta tingkatkan hasil belajar mereka. Pendidikan interaktif berbasis kurikulum 2013 bisa tingkatkan efektifitas hasil belajar siswa, memicu semangat siswa, menghasilkan interaksi langsung antara guru serta siswa, dan menjadikan pendidikan lebih efisien, efektif serta menarik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka dapat digambarkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengetahui program-program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menekan peningkatan angka stunting di Desa Ngiliran, yang kemudian mengevaluasi program tersebut menggunakan model evaluasi CIPP. Fokus dari penelitian ini adalah mengevaluasi program pemerintah Desa Ngiliran dalam menekan kenaikan angka stunting, berdasarkan yang tertulis dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) bidang Kesehatan Desa Ngiliran Tahun 2022.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Evaluasi

Menurut Edwin Wand dan Gerald W. Brow dalam bukunya *Essential of Educational of Education* mengemukakan bahwa: *Evaluation refer to act or process to determining the value the something* (Magdalena et al., 2020). “Evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk menentukan nilai daripada sesuatu.” Evaluasi juga digunakan untuk menilai dan membandingkan sejauh mana kegiatan itu tercapai. Sebagai mana yang di kutip dari kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current*, yaitu *Evaluation is to find out, decide the amount or value* (Lelono, 2022). Artinya, “evaluasi ada suatu upaya untuk menentukan jumlah atau nilai.” Dari beberapa penjelasan mengenai definisi evaluasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan informasi. Sehingga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk menilai dan membandingkan ketercapaian dan kesesuaian kerja sesuatu yang dimana hasil dari menilai dan membandingkan tersebut dapat dijadikan alternatif dalam pengambilan keputusan kebijakan

2.2.2 Evaluasi Program

Evaluasi program adalah pengumpulan informasi yang sistematis mengenai kegiatan, karakteristik, dan hasil dari program untuk membuat penilaian mengenai program ini, meningkatkan efektifitas program, dan atau menginformasikan keputusan mengenai pengembangan program di masa depan. Definisi lain mengenai evaluasi program datang dari *Joint Committee on Standards for Educational Evaluation* (1981) yang mengatakan bahwa evaluasi program adalah evaluasi yang menilai aktivitas kegiatan dengan menyediakan data yang berkelanjutan (Finiswatin, 2022). Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi program adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dalam upaya untuk mengetahui keberhasilan dan keterlaksanaan suatu program yang biasanya dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya.

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Evaluasi Program

Tujuan diadakannya evaluasi program adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program baik yang sudah terlaksana maupun yang sudah berlalu, yang mana dari hasil evaluasi tersebut dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Menurut Sukmadinata yang dikutip oleh Rusdi Ananda (Vitrian, 2021) tujuan evaluasi program diantaranya:

1. Membantu perencanaan dan memberi masukan dalam pelaksanaan program. Evaluasi dapat membantu pengelola program dalam menjalankan program dan memperbaharui perencanaan dilihat dari hasil tindak lanjut dari program sebelumnya.
2. Membantu dalam pemodifikasian program. Hasil evaluasi dapat membantu pengelola program dalam mengetahui hambatan apa saja yang dialami lalu melakukan perbaikan program agar mencapai tingkat keberhasilan yang sudah ditargetkan.
3. Mengetahui informasi kelebihan dan kekurangan dalam suatu program. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait hambatan yang dialami dan keberhasilan yang dicapai dengan itu pengelola dapat dengan mudah mencari solusi dari permasalahan tersebut.
4. Memperoleh penentuan keberlangsungan program. Hasil Evaluasi dapat dijadikan acuan keberlangsungan program. akankah program yang dilaksanakan ini tetap berlanjut atau berhenti dengan mempertimbangkan dan memperbaharui perencanaan program yang ada.
5. Memberikan sumbangan dalam pemahaman proses psikologi, sosial, politik dalam pelaksanaan program serta faktor-faktor yang mempengaruhi program.

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan selanjutnya hasil evaluasi dijadikan sebagai kegiatan tindak lanjut atau acuan mengenai pengambilan keputusan berikutnya

2.2.4 Model-Model Evaluasi

Dikutip dari website “wawasan pendidikan” yang ditulis oleh Abid Abqory (2019). Terdapat beberapa model evaluasi sebagai strategi atau pedoman kerja

pelaksanaan evaluasi program, yaitu:

1) Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Konsep evaluasi model CIPP (context, input, process, and product) pertama kali ditawarkan oleh Stufflebeam pada 1965. *The model is configured for use in internal evaluations conducted by organizations, self-evaluation conducted by individual service providers, and contracted external evaluation* (Stufflebeam, Madaus & Kellaghan, 2002: 279). Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, manajemen, perusahaan dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan Stufflebeam menggolongkan sistem pendidikan atas 4 dimensi yaitu konteks, input, proses dan produk. Sehingga model evaluasinya diberi nama CIPP model yang merupakan singkatan keempat dimensi tersebut.

2) Model Stake's

Kaufman (1980: 125-126) mengemukakan pada model Stake yang pertama adalah fase pendahuluan (*antecedent phase*), atau periode sebelum program dilaksanakan. Fase kedua proses (*transaction phase*) adalah tahap dimana program diterapkan. Fase ketiga hasil (*outcomes phase*) adalah pengukuran hasil program setelah semuanya selesai. Dalam model ini *antecedent* (input), *transaction* (proses), dan *outcomes* (hasil). *Stake points out that when we judge an educational program we do relative comparisons (one program versus another) and/or absolute comparisons (one program versus standards* (Fernandes, 1984: 9).

3) Model Evaluasi Scriven

Michael Scriven lahir di 28 Maret 1928, di Beaulieu, Hampshire, Inggris 1928. Gelar pertamanya adalah dalam bidang matematika dan gelar doktor dalam filsafat. Dia telah membuat kontribusi yang signifikan di bidang filsafat, psikologi, berpikir kritis, dan yang paling terutama, evaluasi (menciptakan sebuah penemuan untuk evaluasi program). Scriven adalah mantan Presiden *American Educational Research Association* dan *American Association Evaluation*. Ada dua model evaluasi yang dikembangkan Scriven: *Goal Free Evaluation* dan *Formatif-Summatif Evaluation*.

Dalam *Goal Free Evaluation*, Scriven mengemukakan bahwa dalam melaksanakan evaluasi program evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya (kinerja) suatu program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi (pengaruh) baik hal-hal yang positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal yang negatif (yang tidak diharapkan).

Evaluasi formatif adalah suatu evaluasi yang biasanya dilakukan ketika suatu produk atau program tertentu sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali dengan tujuan untuk melakukan perbaikan. Ada dua faktor yang mempengaruhi kegunaan evaluasi formatif, yaitu kontrol dan waktu. Bila saran perbaikan akan dijalankan, maka evaluasi formatif diperlukan sebagai kontrol. Informasi yang diberikan menjadi jaminan apakah kelemahan dapat diperbaiki. Apabila informasi mengenai kelemahan tersebut terlambat sampai kepada pengambilan keputusan, maka evaluasi bersifat sia-sia.

4) Model Evaluasi CSE (*The Center the Study of Evaluation*)

Fokus keputusan tahap pertama dari Model CSE adalah seleksi masalah. Apa yang dapat Anda lakukan yang membenarkan keberadaan program ini? Untuk apa kebutuhan adalah tujuan dari program ini? Apa tujuan adalah tujuan dari program?

Tahap kedua dan ketiga dari CSE memberikan informasi mengenai jenis-jenis program instruksional yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi dalam tahap pertama. Perencanaan harus diletakkan pada saat untuk evaluasi program. Desain perencanaan program yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam CSE evaluator memulai pekerjaannya dengan melihat tujuan program. Evaluasi formatif membutuhkan mengumpulkan berbagai informasi untuk perbaikan program. Evaluasi formatif menjadi tujuan program.

Pada tahap keempat, evaluator melihat dampak keseluruhan dari sebuah program. Evaluasi sumatif menentukan apakah tujuan program telah selesai dilaksanakan.

5) Model Evaluasi *Discrepancy*

Model evaluasi *Discrepancy* atau ketidaksesuaian dikembangkan oleh Malcom Provus untuk memberikan informasi penilaian program dan perbaikan

program. Evaluasi sebagai proses menyepakati suatu standar program menentukan apakah ada ketidaksesuaian antara beberapa aspek program dan standar yang mengatur aspek program dan menggunakan informasi untuk mengidentifikasi perbedaan kelemahan program. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menentukan apakah untuk meningkatkan, mempertahankan atau mengakhiri program. Model evaluasi ini berusaha untuk mengidentifikasi kelemahan (sesuai dengan standar yang dipilih) dan mengambil tindakan korektif dengan penghentian sebagai pilihan terakhir.

6) Model Evaluasi *Adversary*

Model evaluasi *Adversary* atau berlawanan adalah salah satu model evaluasi yang dalam pelaksanaannya evaluator dibagi atas dua tim yaitu tim yang pro dan kontra. Dimana kedua kelompok ini akan bekerja secara profesional untuk mencari data-data yang pro atau mendukung dan yang kontra atau bertentangan sehubungan dengan pokok persoalan, program, proyek, material dan sebagainya.

2.2.5 Efektivitas

Efektivitas merupakan keterkaitan antara hasil dengan tujuan yang ingin dicapai, semakin besar hasil yang dicapai dari pada besaran tujuan yang ditetapkan, maka akan semakin efektif pula kegiatan maupun program yang dibuat. Efektivitas ini difokuskan pada hasil, program, atau kegiatan yang disesuaikan sehingga hasil yang diberikan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan sebelumnya, atau capaian yang dihasilkan lebih dari pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan ukuran efektivitas ini sangat beragam karena memiliki banyak kriteria di dalamnya. Efektivitas merupakan bagian dari standar yang nantinya dapat memenuhi suatu tujuan dan sasaran (Baria, 2019).

Istilah efektivitas berhubungan dengan upaya evaluasi (Firdausa, 2022). Efektivitas merupakan indikator evaluasi kegiatan yang menentukan apakah program kegiatan yang dilakukan dapat menciptakan perubahan bentuk dan pengelolaan organisasi menjadi lebih baik. Menurut Hidayat pada tahun 1986 yang dikutip dari Firdausa (2022), menjelaskan bahwa efektivitas adalah ukuran seberapa baik suatu target tercapai. Agar efektif, pelaksana program perlu memikirkan tujuan organisasi dan mekanisme pertahanan untuk mencapainya.

Dengan kata lain, dalam menilai efektivitas perlu berhubungan dengan masalah maksud dan tujuan.

Mengevaluasi perjalanan yang dapat dilakukan organisasi melalui konsep efisiensi (Fauzi, 2022). Konsep ini merupakan sarana untuk menentukan apakah perubahan signifikan perlu dilakukan pada penampilan dan manajemen organisasi. Efektivitas setiap tujuan organisasi melalui efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia dalam hal masukan (input), proses dan keluaran (output). Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif jika operasi tersebut dilakukan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

2.2.6 Pengukuran Efektivitas

Maka dalam mengukur efektivitas menurut Budiani pada tahun 2017 yang dikutip melalui Margareta (2022), mengemukakan bahwa ada empat indikator yang dapat dipergunakan, yaitu:

- 1) Ketepatan sasaran program, dapat diartikan bahwa sasaran tersebut dijadikan sebagai alat ukur untuk mencapai suatu tujuan, sasaran dalam indikator ini lebih kepada operasional yang menunjang adanya keberhasilan dalam program tersebut.
- 2) Sosialisasi program, dapat diartikan bahwa program yang telah ditetapkan kemudian disebarluaskan kepada masyarakat sebagai bentuk informasi resmi mengenai pelaksanaan program, sehingga dapat menjadi cara awal untuk mencapai efektivitas yang diharapkan.
- 3) Tujuan program, tujuan merupakan kesesuaian antara sasaran dengan hasil yang diperoleh dengan menetapkan target tersebut dalam kurun waktu yang telah disepakati pula.
- 4) Pemantauan program, merupakan langkah akhir dalam efektivitas, dimana dalam pelaksanaannya merupakan suatu bentuk kepedulian dari pelaksana program terhadap program yang dibuat, apakah dapat menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, atau justru terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

2.2.7 Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (2) dan (3), ditegaskan bahwa (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24, menegaskan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. Partisipatif.

